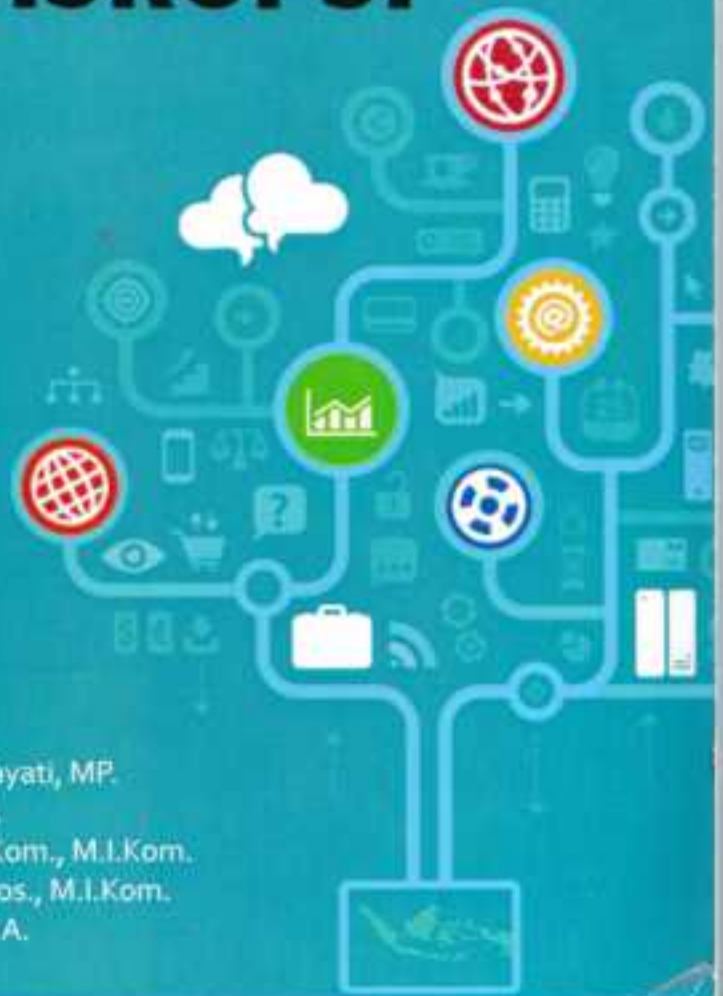


**Editor
Dr. Suwardi**

**Book
Chapter**

INDONESIA DALAM ERA DISRUPSI



Penulis:

Dr. Sutoyo, M.Pd

Dr. Ir.Dewi Ratna Nurhayati, MP.

Halifa Haqqi, S.IP.,M.Si.

Haryo Kusumo Aji, S.I.Kom., M.I.Kom.

Andri Astuti Itasari, S.Sos., M.I.Kom.

Hasna Wijayati, S.IP. M.A.

Indonesia dalam Era Disrupsi

Editor:

Dr. Suwardi

Penulis:

Dr. Sutoyo, M.Pd
Dr. Ir.Dewi Ratna Nurhayati, MP,
Halifa Haqqi, S.IP.,M.Si.
Haryo Kusumo Aji, S.I.Kom., M.I.Kom.
Andri Astuti Itasari S.Sos., M.I.Kom.
Hasna Wijayati, S.IP. M.A.

Penerbit

Unisri Press © 2020



Indonesia dalam Era Disrupsi

Editor:

Dr. Suwardi

Penulis:

Dr. Sutoyo, M.Pd

Dr. Ir. Dewi Ratna Nurhayati, MP.

Halifa Haqqi, S.IP., M.Si.

Haryo Kusumo Aji, S.I.Kom., M.I.Kom.

Andri Astuti Itasari, S.Sos., M.I.Kom.

Hasna Wijayati, S.IP. M.A.

ISBN : 978-623-93591-7-1

Desain sampul dan tata letak:

Rusdianto

Penerbit:

UNISRI Press

Jalan Sumpah Pemuda No 18, Joglo, Banjarsari,

Kota Surakarta

unisripress@gmail.com

Anggota APPTI

Dicetak oleh Percetakan Kurnia Solo

Cetakan Pertama, Juni 2020

Copyright © 2020

ISI MENJADI TANGGUNG JAWAB PENULIS

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang, dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Revolusi industri berlangsung tanpa bisa dihentikan. Kini, kita telah memasuki era revolusi industri keempat, yang dicirikan pada keberadaan teknologi digital bersama segala kecanggihan *internet of things*. Keberadaan internet yang seolah tanpa batas menghadirkan era baru yang dikenal sebagai era disrupsi. Dampak positif dan negatif pun dapat mengiringi perkembangan era baru ini. Banyak orang khawatir bahwa manusia akan kalah dengan teknologi, hingga muncul prediksi aneka pekerjaan apa saja yang akan hilang seiring perkembangan *artificial intelegent*. Padahal, dengan strategi yang tepat, semisal mengoptimalkan konsep *human centered* pada *smart society 5.0*, mungkin bisa jadi jawaban akan kekhawatiran tersebut.

Indonesia pun menghadapi dilematika yang serupa. Indonesia harus mampu bersiap dengan berbagai langkah dan strategi, serta mengenali kondisi apa yang tengah dihadapi. Dengan begitu, Indonesia dapat memenangkan era disrupsi ini, dan muncul sebagai bangsa yang besar. Buku ini merupakan hasil kolaborasi penelitian terkait bagaimana gambaran posisi Indonesia dalam era disrupsi, sekaligus langkah apa yang telah dan dapat dilakukan. Penelitian yang tertuang dalam buku ini merangkum berbagai bidang studi karena para penulis memiliki latar belakang studi yang berbeda-beda sehingga menghasilkan alur pemikiran yang khas. Tentu saja, muara dari masing-masing tema mengerucut pada upaya "Menakar Indonesia dalam Era Disrupsi".

Para penulis adalah dosen dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta, dengan latar belakang bidang ilmu pendidikan, ilmu pertanian, ilmu hubungan, internasional, juga ilmu komunikasi. Para penulis memiliki minat yang sama dalam mengamati pola perkembangan era disrupsi di bidangnya masing-masing. Lantas, lahirlah sinergi untuk menyatukan pemikiran dari berbagai latar belakang ini, menjadi kesatuan yang padu. Buku ini diharap bisa menyajikan gambaran tentang Indonesia di era disrupsi, sehingga para pembaca dapat menangkapnya sebagai peluang dan bersiap dengan strategi.

Editor,

Dr. Suwardi

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Pendidikan Nilai Pancasila di Era Industri 4.0 dalam Rangka Menujudkan Jati Diri Bangsa yang Maju dan Bermartabat, oleh Dr. Sutoyo, M.Pd.....	1
Atakus RI 4.0 bagi Pertanian, oleh Dr. Ir. Dewi Ratna Nurhayati, SIP.....	42
Kebijakan "Making Indonesia 4.0" sebagai Langkah Membangun Society 5.0, oleh Halifa Haqqi, S.IP., M.A.....	49
Youtube menjadi Tempat Belajar Masa Kini, oleh Haryo Kusumo Aji, S.I.Kom., M.I.Kom.....	64
Digitalisasi dan Perubahan Sosial di Era Disrupsi, oleh Andri Astuti Itahari, S.Sos., M.I.Kom.....	73
Menakar Side Effect RI 4.0 dan Kesiapan Indonesia, oleh Hasna Wijayati, S.IP., M.A.....	80

Pendidikan Nilai Pancasila di Era Industri 4.0 dalam Rangka Mewujudkan Jati Diri Bangsa yang Maju dan Bermartabat

Dr. Sutoyo, M.Pd
Email: Sutoyoprtnama@gmail.com

Pendahuluan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai bekal kehidupan di masyarakat. Pendidikan dapat dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang dilaksanakan secara formal melalui pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi dengan kurikulum yang sudah dibakukan. Pendidikan non formal merupakan pendidikan yang dilaksanakan di masyarakat tanpa menggunakan kurikulum yang dibakukan, yang disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan pendidikan informal merupakan pendidikan yang berlangsung di dalam keluarga.

Hal tersebut sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Secara ringkas bahwa tujuan pendidikan

adalah untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia yang cerdas, terampil dan bermoral. Tujuan ini merupakan tujuan yang sangat ideal yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia. Namun tingkat ketercapaiannya dalam realitas sangatlah sulit untuk diwujudkan.

Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (Ipteks) yang selalu berkembang tiada henti, menuntut kesiapan dan komitmen para pemangku kebijakan pendidikan untuk mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional. Apalagi saat sekarang kita sudah memasuki era industri 4.0. Era ini ditandai dengan digitalisasi dalam semua aspek kehidupan. Bagaimana pendidikan nilai Pancasila berperan dalam era industri 4.0. Sebab semaju apapun negara dan bangsa ini, nilai karakter bangsa tidak boleh diabaikan. Justru kalau bangsa ini menginginkan maju dan tidak ingin hancur, maka pendidikan nilai Pancasila harus ditanamkan kepada peserta didik sejak usia dini. Pendidikan nilai Pancasila merupakan pendidikan nilai yang tidak sekedar menuntut pada pemahaman secara kognitif, melainkan pendidikan yang utuh sampai tataran internalisasi nilai.

Penyimpangan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat, Berbangsa dan Bernegara.

Sejak munculnya era industri 1.0 sampai saat ini, era industri 4.0, penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila terus terjadi dan seakan-akan tidak ada hentinya. Hal ini terjadi baik pada tataran penyelenggaraan negara dan pemerintahan maupun dalam

tataran kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Sorotan terhadap perilaku menyimpang para elit politik, jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif selalu terus bermunculan. Begitu pula sorotan tentang perilaku menyimpang masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang seakan-akan tidak pernah ada hentinya. Jika penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dibiarkan dan tidak ada solusi maka akan dapat melemahkan sendi-sendi dalam kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara realita saat ini banyak penyimpangan terhadap nilai-nilai sila I yakni sila Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dapat dilihat bahwa masih banyak orang yang mengaku dan menyatakan percaya dan bertaqwa terhadap Tuhan, namun kenyataannya tidak menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Misalnya mengaku beragama Islam, Kristen, Katolik atau agama yang lain, tetapi hanya dalam kartu tanda penduduk (KTP). Tuntutan sikap saling hormat menghormati, sikap bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam menjalankan ibadah yang seharusnya dapat menciptakan terbinanya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat sering terciderei dengan adanya sikap, tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Justeru kadang muncul sikap memaksakan kehendak dari satu penganut agama dan kepercayaan kepada penganut agama dan kepercayaan yang lain.

Di kalangan peserta didik masih ada penyimpangan terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana masih banyak peserta didik yang tidak bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

saat sekarang banyak peserta didik yang memakai pakaian yang tidak sopan, minum-minuman keras, menggunakan narkoba, melakukan hubungan seks bebas, dan bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri,

Masih kurangnya pemahaman dan pengamalan dalam wujud tindakan dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat terhadap nilai-nilai sila ke II yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi salah satu penyebab hubungan secara horisontal antar warga yang satu dengan warga yang lain kurang harmonis. Sikap pengakuan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban, sikap harus saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semana-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan senang melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang seharusnya itu menjadi ciri masyarakat Indonesia dalam menjalin hubungan dalam kehidupan bermasyarakat belum bisa terwujud secara baik dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai sila Kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya belum semuanya terwujud secara nyata. Secara khusus di kalangan peserta didik juga banyak penyimpangan terhadap sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Penyimpangan yang dilakukan oleh peserta didik, diantaranya adanya perkelahian antar pelajar yang disertai dengan

penyiksaan, playboy di kalangan pelajar dimana mempermainka wanita dengan sesuka hati, dan pemerkosaan oleh pelajar.

Nilai sila Persatuan Indonesia mengandung makna usaha kearah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Kenyataan menunjukkan bahwa masih bermunculan sikap tidak berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menunjukkan sikap kebarat-baratan dan tidak cinta tanah air, membanggakan bangsa lain dari pada bangsanya sendiri, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum dan golongan. Artinya nilai-nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia belum sepenuhnya dipahami dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Di kalangan peserta didik juga banyak kita jumpai penyimpangan terhadap sila persatuan Indonesia. Penyimpangan itu diantaranya, adalah adanya penurunan sikap nasionalisme. Misalnya bergaya hidup yang kebarat-baratan, mengutamakan produk luar negeri, pada saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya tidak serius, menghormat bendera sang merah putih tidak dengan sikap tegap. Bentrok antar genk pelajar, karena terprovokasi isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan

musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Artinya nilai-nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang seharusnya diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara belum terlaksana dan justru terjadi banyak penyimpangan.

Nilai-nilai sila ke IV yang seharusnya diaktualisasikan dengan baik tetapi justru belum dilaksanakan dengan baik. Banyak penyimpangan yang terjadi diantaranya, adalah sikap mengutamakan voting dalam mengambil keputusan dan justru mengabaikan prinsip musyawarah untuk mufakat, dalam mengambil keputusan tidak didasari sikap kekeluargaan tetapi justru egoisme pribadi dan golongan yang mengemuka, tidak ada sikap baik dan kurang bertanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan keputusan hasil musyawarah, dalam melaksanakan musyawarah didasari pikiran emosional, tidak berdasarkan akal sehat sesuai hati nurani yang luhur, dan keputusan yang diambil kurang dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, tidak menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta nilai keberanian dan keadilan.

Secara khusus ada beberapa penyimpangan peserta didik terhadap sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Penyimpangan itu antara lain antara para pelajar yang tidak menjalankan dan menghargai putusan bersama, kurang menghargai pendapat orang lain, dan mengutamakan egoisme pribadi atau kelompok.

Nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Persoalan yang muncul adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang seharusnya bisa dipahami dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara belum teraktualisasikan dengan baik. Kenyataannya justru muncul sikap tidak adil, sikap ketidakmampuan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, sering adanya pemerasan terhadap orang lain, banyak orang bersikap boros dan bergaya hidup mewah, serta sikap bermalas-malasan.

Penyimpangan terhadap sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga dilakukan oleh para peserta didik. Penyimpangan itu diantaranya, adalah masih banyak peserta didik yang hanya menuntut hak dan mengabaikan kewajiban, senang berfoya-foya dan bergaya hidup boros, malas belajar dan tidak suka bekerja keras.

Indikasi secara umum dapat dilihat dengan munculnya kasus kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, tindakan kekerasan, dan munculnya perilaku tidak terpuji (Mawardi, 2009). Di sisi lain Supriyoko (2003 : 3) menyatakan bahwa tidak sedikit generasi muda yang gagal menampilkan akhlak terpuji, sikap sopan santun, sifat ramah, tenggang rasa, rendah hati, suka menolong, solidaritas sosial, yang merupakan jati diri bangsa seakan akan sudah hilang dan tidak lagi melekat secara kuat dalam diri peserta didik.

Hal ini diperkuat oleh Samani dan Haryanto (2012 : 2) dan Haryanto (2011 : 34) yang menyatakan bahwa kenakalan remaja yang sering terjadi, seperti pemerasan antar teman, kekerasan antar teman, penggunaan narkoba, tawuran antar pelajar, adalah demoralisasi di kalangan pelajar. Hal ini diakui atau tidak ini menunjukkan adanya penyimpangan bahwa perilaku pelajar sekarang kian bebas dan menjauh dari nilai-nilai Pancasila, yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara serius dan tepat. Jika ini tidak ditangani secara serius dan tepat maka fenomena perilaku menyimpang di kalangan pelajar akan semakin meluas dan mengancam.

Hal tersebut di atas menunjukkan, bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila belum dijalankan sesuai harapan. Menyikapi hal tersebut dipandang perlu untuk selalu mengupayakan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah. Hal ini sejalan dengan pemikiran Horba (2001 : 1) yang menyatakan, bahwa tanamkan buah pikiran, anda akan menuai tindakan, tanamkan tindakan, Anda akan menuai kebiasaan, tanamkan kebiasaan, anda akan menuai prestasi, tanamkan moral anda akan menuai keuntungan.

Kritikan dan sorotan tentang pendidikan di Indonesia tidak hanya masalah moral peserta didik yang masih jauh dari harapan. Kritik dan sorotan itu muncul juga dalam proses pembelajaran, dimana pembelajaran di Indonesia cenderung menekankan aspek pengetahuan dan mengabaikan aspek sikap (Suyanto, 2003). Hal ini

berarti guru dalam penyampaian materi belum mengarah ke penyampaian materi secara komprehensif.

Upaya untuk meningkatkan kualitas hasil belajar baik aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan banyak faktor yang mempengaruhinya. Diantaranya adalah faktor guru. Guru harus kreatif dan inovatif dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Dalam Kurikulum 2013 menuntut partisipasi aktif dari seluruh peserta didik. Kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik tidak lagi berpusat pada guru. Oleh karena itu suasana kelas perlu dirancang dan dibangun dengan berbagai model pembelajaran yang tepat sehingga peserta didik memperoleh kesempatan untuk berinteraksi dengan teman yang lain secara baik sehingga pada akhirnya peserta didik memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan secara utuh.

Dalam proses pembelajaran guru memegang peranan yang strategis dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Hal ini karena guru dalam proses pembelajaran tidak cukup sekedar menyampaikan pengetahuan yang berkaitan dengan materi yang diajarkan melainkan perlu memperhatikan aspek-aspek yang lain yang mendukung terwujudnya pengembangan potensi peserta didik. Peran guru dalam hal ini tidak bisa digantikan oleh pihak yang lain (Supriyadi, 1998).

Oleh karena itu, guru dalam mengajar seharusnya tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga harus memberikan nilai-nilai, sehingga pembelajaran yang berlangsung dapat menghasilkan pesan secara utuh baik secara pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Hal ini diharapkan peserta didik dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi manusia yang berkepribadian (Sardiman, 2002).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas menunjukkan, bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan peserta didik masih rendah. Padahal internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan peserta didik menjadi hal yang mendasar dalam rangka untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Hal ini jika tidak segera dilakukan maka akan terjadi kemerosotan moral di kalangan pelajar dan peserta didik yang berkelanjutan.

Kemerosotan moral di kalangan pelajar atau peserta didik yang berkelanjutan akan berdampak serius terhadap kelangsungan sikap berbangsa dan bernegara. Karena pelajar merupakan generasi yang diharapkan mampu menerima dan melanjutkan estafet kepemimpinan di negeri ini. Tidak dapat kita bayangkan apa jadinya negeri ini jika nantinya dipimpin oleh generasi yang mempunyai sikap moral yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Hal inilah yang menjadi tantangan di era industry 4.0. oleh karena itu pendididkan nilai-nilai Pancasila menjadi salah satu alternatif jawaban untuk menselaraskan sikap kepribadian dengan kemajuan teknologi. Diyakini jika kemajuan teknologi diikuti sikap moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju dan bermartabat.

Isi Arti Pancasila Secara Utuh

Isi arti Pancasila dapat dilihat dari isi arti Pancasila yang abstrak umum universal, isi arti Pancasila yang umum kolektif, dan

isi arti Pancasila yang khusus konkret (Suhadi, 2001). Istilah-istilah dalam sila-sila Pancasila adalah, Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Masing-masing terdiri atas kata dasar ditambah imbuhan "ke+an" untuk sila 1,2,4,5 dan imbuhan "per+an" pada sila 3. Menurut ilmu bahasa, kata dasar yang mendapat imbuhan "ke+an" menjadikan kata tersebut mempunyai arti yang bersifat abstrak. Sedang kata dasar yang mendapat tambahan imbuhan " per+an" menjadikan kata tersebut mempunyai arti yang bersifat konkret.

Berdasarkan hal tersebut maka istilah pokok dalam sila-sila Pancasila mengandung pengertian abstrak. Abstrak yang dimaksud adalah ada tetapi tidak nampak wujudnya, tidak dapat ditangkap dengan indra, hanya dapat ditangkap dengan roh kalbu, dan bersifat tetap tidak berubah. Di samping itu istilah-istilah pokok dalam sila-sila Pancasila mengandung pengertian yang bersifat umum universal. Pengertian yang bersifat umum universal maksudnya adalah umum seumumnya, tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terikat oleh kelompok atau lingkungan tertentu, tidak terbatas oleh jumlah tertentu, dan bersifat tetap serta tidak berubah oleh keadaan, ruang, dan waktu.

Menurut Notonagoro (1974), karena sila-sila Pancasila itu mempunyai pengertian yang bersifat abstrak dan memiliki pengertian yang bersifat umum universal, maka isi arti Pancasila yang bersifat abstrak umum universal itu bersifat tidak berubah, dan akan tetap melekat pada kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Inti isi sila 'Ketuhanan Yang Maha Esa' sebagai pengertian yang abstrak umum universal adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat Tuhan. Hakikat Tuhan adalah hanya satu dan selama-lamanya ada atau abadi, dzat yang mutlak, sempurna, kuasa, tak terbatas dan tidak berubah, pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta, dan wajib ditaati.

Inti isi sila 'Kemanusiaan yang adil dan beradab' sebagai pengertian yang abstrak umum universal adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat manusia. Adapun hakikat manusia itu adalah manusia makhluk momopluralis yang terdiri dari kodrat monodualis jiwa dan raga, sifat kodrat monodualis individu dan makhluk sosial dan kedudukan kodrat monodualis mandiri dan makhluk Tuhan.

Inti isi sila 'Persatuan Indonesia' sebagai pengertian yang abstrak umum universal, adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat satu. Adapun hakikat satu adalah mutlak tak dapat terbagi, mutlak terpisah dari hal lain, merupakan diri pribadi, bukan keseluruhan yang terpisah dari hal lain. Sebagai negara kesatuan, maka Negara Republik Indonesia itu merupakan satu kesatuan, mutlak tidak dapat terbagi-bagi, mutlak terpisah dengan negara lain, bereksistensi tersendiri, mempunyai bentuk dan susunan pemerintahan tersendiri.

Inti isi sila 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan' sebagai pengertian yang abstrak umum universal adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat rakyat. Adapun hakikat

rakyat adalah keseluruhan jumlah orang warga dalam lingkungan daerah tertentu atau negara, segala sesuatunya meliputi semua warga dan untuk kepentingan seluruh warga, setiap warga memiliki hak-hak asasi kemanusiaan dan wajib-wajib asasi kemanusiaan.

Inti isi sila 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' sebagai pengertian yang abstrak umum universal adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat adil. Adapun hakikat adil adalah dipenuhinya sebagai wajib segala sesuatu yang merupakan hak dalam hubungan hidup kemanusiaan, lebih mengutamakan pemenuhan kewajiban dari pada pemenuhan hak.

Isi arti Pancasila yang umum kolektif adalah terbatas pada ruang dan waktu, terikat oleh kelompok atau lingkungan tertentu dan terbatas oleh jumlah tertentu. Isi arti Pancasila yang umum kolektif merupakan penjabaran dari isi arti Pancasila secara abstrak umum universal yang berlaku secara umum namun terbatas pada suatu kolektifitas bangsa dan negara Indonesia.

Isi arti Pancasila secara umum kolektif secara formal tercantum di dalam berbagai ketentuan dan peraturan hukum maupun peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Antara lain tercantum dalam UUD 1945, Ketetapan-ketetapan MPR, dan Undang-Undang.

Isi arti Pancasila yang umum kolektif dari sila 'Ketuhanan yang Maha Esa' antara lain, negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat

menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, mewajibkan pemerintah dan para penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, tujuan pendidikan nasional antara lain untuk menjujung manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan.

Isi arti Pancasila yang umum kolektif dari sila 'Kemanusiaan yang adil dan beradab', antara lain sebagai warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagai warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi dan pemerintahan, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kesetiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, pemerintah wajib memajukan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan kesejahteraan Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Isi arti Pancasila yang umum kolektif dari sila 'Persatuan Indonesia', antara lain adalah berkat perjuangan bangsa Indonesia terdapatlah negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat, negara melindungi bangsa dan tanah air dengan berdasar atas persatuan, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, perwujudan persatuan nuanantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Isi arti Pancasila yang umum kolektif dari sila 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan', antara lain negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan, kedaulatan di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR, segala keputusan dilaksanakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, setiap putusan harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan, kejujuran dan tanggung jawab.

Isi arti Pancasila yang umum kolektif dari sila 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia', antara lain negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, tujuan negara dan tugas pemerintah antara lain ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar keadilan sosial, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan, bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, warga negara bebas memilih pekerjaan yang dikehendaki, warga negara berhak untuk untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak milik perseorang diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat, pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata material maupun spiritual, setiap warga negara Indonesia berhak menikmati hasil-hasil pembangunan secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan dharma baktinya, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya

keadilan distributifnya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan kesejahteraan lahir batin yang lebih selaras adil dan merata, meningkatkan taraf hidup, peradaban dan kesejahteraan lahir dan batin.

Isi arti Pancasila yang umum kolektif tersebut di atas adalah norma umum yang merupakan pedoman pokok dan berlaku secara umum dalam suatu kolektifitas bangsa dan negara Indonesia. Isi ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya isi arti Pancasila yang umum kolektif harus dijabarkan lebih lanjut dan ditransformasikan menjadi isi arti Pancasila yang khusus konkret.

Isi arti Pancasila yang khusus konkrit adalah isi arti Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan nyata yaitu menyesuaikan dengan keadaan, perkembangan zaman, peradaban, sains dan ipteks, namun tanpa menyimpang dari isi arti Pancasila yang umum kolektif maupun isi arti Pancasila yang umum abstrak. Isi arti Pancasila secara khusus konkrit banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Isi arti Pancasila yang khusus konkret dari sila 'Ketuhanan Yang Maha Esa', antara lain setiap mau berangkat ke sekolah berdoa, setiap pulang dari sekolah memanjatkan syukur, menghindarkan diri dari perbuatan maksiat (berjudi, minum-minuman keras, memakai busana terlarang), menghindarkan diri dari perbuatan tercela (menghujat, menghujat dan memfitnah), tidak berbuat kerusakan di muka bumi (membakar hutan, menjarah barang, membunuh orang).

Isi arti Pancasila yang khusus konkret dari sila 'Kemanusiaan yang adil dan beradab' antara lain para siswa di

sekolah mengumpulkan dana dan sumbangan dari para dermawan untuk membantu bencana, mengikuti kegiatan kemanusiaan, dan darah, mencegah berbagai tindak kerusuhan, penjarahan, pengrusakan, pemerkosaan dan tawuran.

Isi arti Pancasila yang khusus konkret dari sila 'Persatuan Indonesia' antara lain dalam pergaulan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengikuti berbagai kegiatan olah raga dan seni di sekolah, melakukan belajar kelompok/belajar bersama, bergaul dengan teman yang berbeda suku, agama dan tanpa memandang perbedaan apapun, berlatih menghimpun dalam suatu organisasi sekolah.

Isi arti sila Pancasila yang khusus konkret dari sila 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan', antara lain semua siswa mengikuti pemilihan ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah, menghargai pendapat orang lain.

Isi arti Pancasila yang khusus konkret dari sila 'Kendali sosial bagi seluruh rakyat Indonesia', antara lain para siswa menyelenggarakan pasar murah sembako, memberikan bantuan kepada orang fakir miskin.

Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Internalisasi

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki nilai-nilai luhur yang bersifat universal. Nilai atau *value* adalah keberhargaan dari kemampuan yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia (Kaelan, 1996). Atas dasar itu maka

dikatakan bahwa nilai atau *value* adalah keberhargaan dari sesuatu atau yang ada pada barang sesuatu yang bersifat kekal pada barang sesuatu. Sesuatu itu dikatakan bernilai apabila sesuatu itu bermanfaat atau mengandung unsur-unsur bermanfaat karena benar, baik, indah, atau relegius. Untuk menentukan bernilai tidaknya sesuatu dilihat kesesuaiannya dengan unsur yang terdapat pada diri manusia, yakni unsur jasmani dan rohani yang terdiri dari akal pikiran atau cipta, rasa, karsa dan keyakinan (Darmodihardjo, 1988). Pada kenyataannya yang bernilai tidak hanya benda-benda atau sesuatu yang bersifat materi belaka, melainkan segala sesuatu yang tidak berujud materi yang oleh Masaguro (1974) disebut sesuatu yang bersifat immaterial.

Menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian mengambil keputusan. Keputusan itu merupakan keputusan nilai yang menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, indah atau tidak indah. Keputusan nilai yang dilakukan oleh subjek penilaian tentu berhubungan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia sebagai subjek penilai, yaitu unsur jasmani, akal, rasa, karsa dan kepercayaan. Sesuatu itu dikatakan bernilai apabila sesuatu itu berharga, berguna, benar, indah, dan baik. Di dalam nilai itu sendiri terkandung cita-cita, harapan-harapan, dan keharusan. Maka apabila kita berbicara tentang nilai sebenarnya kita berbicara tentang hal yang ideal, yakni hal yang menjadi cita-cita, harapan, dambaan dan keharusan.

Budiyono (2009) mengemukakan, bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai yang dapat dikembangkan dan digunakan sebagai pedoman untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada tiap sila Pancasila, adalah Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, meliputi : (1). Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (2). Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; (3). Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (4). Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (5). Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dipercayai dan diyakininya; (6). Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; (7). Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mengandung nilai-nilai sebagai berikut : (1). Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa; (2). Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa

beda-beda suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit; (3). Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia; (4). Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira; (5). Mengembangkan sikap tidak sewenang-wenang terhadap orang lain; (6). Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan; (7). Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; (8). Berani membela kebenaran dan keadilan; (9). Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia; (10). Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Sila ketiga Persatuan Indonesia mengandung nilai-nilai : (1). Saling menghormati dan menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan; (2). Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan; (3). Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa; (4). Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia; (5). Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; (6). Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika; (7). Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila keempat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan mengandung nilai-nilai : (1). Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama; (2). Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain;

(3). Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama; (4). Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan; (5). Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah; (6). Dengan etika baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah; (7). Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan; (8). Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur; (9). Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama; (10). Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayakan untuk melaksanakan permusyawaratan.

Sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai : (1). Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan; (2). Mengembangkan sikap adil terhadap sesama; (3). Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; (4). Menghormati hak orang lain; (5). Suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri; (6). Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain; (7). Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah; (8). Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum; (9).

tidak bekerja keras; (10). Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan bersama; (11). Tidak melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

Nilai-nilai Pancasila sebagai Suatu Sistem

Arti nilai-nilai Pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hakikat Pancasila yang umum universal yang merupakan nilai-nilai Pancasila, sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yaitu sebagai dasar negara yaitu bersifat umum kolektif serta aktualisasi Pancasila yang bersifat khusus dan konkret dalam berbagai bidang kehidupan. Hakikat nilai-nilai Pancasila adalah merupakan nilai-nilai, sebagai pedoman negara yang bersifat normatif, adapun aktualisasinya merupakan pelaksanaan konkret Pancasila.

Substansi Pancasila dengan kelima silanya yang terdapat dalam ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan merupakan prinsip dasar yang mengandung kualitas tertentu yang merupakan cita-cita dan harapan atau hal yang ditujukan oleh bangsa Indonesia untuk diwujudkan menjadi kenyataan riil dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun di samping itu, prinsip-prinsip dasar tersebut sebenarnya juga diangkat dari kenyataan riil. Prinsip-prinsip tersebut telah menjelma dalam tertib sosial, tertib masyarakat dan tertib kehidupan bangsa Indonesia, yang dapat ditemukan dalam adat istiadat, kebudayaan dan kehidupan keagamaan atau

kepercayaan bangsa Indonesia. Demikian pula, sesuai dengan yang terkandung di dalam Pancasila itu, yang mengandung masalah pokok dalam kehidupan manusia Indonesia yaitu bagaimana "seharusnya", manusia itu terhadap Tuhan, diri sendiri dan segala sesuatu di luar dirinya, maka dalam hal ini dapat diketahui adanya implikasi nilai-nilai nilai moral. Dengan demikian substansi Pancasila itu merupakan nilai, yang harus dijabarkan ke lanjut ke dalam suatu norma dan selanjutnya direalisasikan dalam kehidupan nyata.

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila I sampai dengan V Pancasila merupakan cita-cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya. Sejak dahulu nilai-nilai itu selalu didambakan, dicita-citakan bangsa Indonesia agar terwujud dalam masyarakat yang tata tentrem, karta raharjaya, gemah ripah loh jinawi, dengan penuh harapan diupayakan terealisasi dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia. Driyarkara menyatakan bahwa bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan *Sein im Sollen*. Ia merupakan harapan, cita-cita tetapi sekaligus adalah kenyataan bagi bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia dalam hal ini merupakan pendukung nilai-nilai (*subscriber of values*) Pancasila. Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan dan berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia menghargai, mengakui, menerima Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai. Pengakuan, penghargaan dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak

gejala dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan atau penghargaan itu telah terwujud dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia dan bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus telah mengemban dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu mempunyai kekuatan dan bobot yang berbeda, namun nilai-nilai itu tidak saling bertentangan, tetapi nilai-nilai itu saling melengkapi. Hal ini menjadikan sebagai suatu substansi, Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, atau kesatuan organik (*organic whole*). Dengan demikian berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh pula. Nilai-nilai itu saling berhubungan secara erat dan nilai-nilai yang satu tidak dapat dipisahkan dari nilai yang lain. Nilai-nilai yang ada itu, dimiliki bangsa Indonesia, yang akan memberikan pola (*patron*) bagi sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia.

Pengertian Pancasila itu merupakan suatu sistem nilai dapat diartikan dari sila-sila Pancasila yang merupakan suatu sistem. Sila-sila itu merupakan kesatuan organik. Antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan secara erat. Dengan demikian, Pancasila itu merupakan suatu sistem dalam pengertian umum, yang berarti bahwa bagian-bagiannya (sila-silanya) saling berhubungan secara erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh (Kaelan, 2002).

Berdasarkan uraian mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila itu pula, tampak dengan jelas bahwa nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila termasuk dalam tingkatan nilai yang tinggi, dengan urutan sila Ketuhanan Yang Maha Esa menduduki tingkatan dan bobot nilai tertinggi, karena secara jelas mengandung nilai religius. Pada tingkatan di bawahnya adalah keempat nilai manusiawi dasar. Apabila keempat nilai manusiawi dasar itu diberikan tingkatan dan bobot nilainya, maka nilai kemanusiaan tingkatan dan bobot nilainya layak dinyatakan berada di bawah nilai ketuhanan. Nilai keadilan sebagai salah satu nilai manusiawi dalam hubungannya dengan tingkatan dan bobot nilai kiranya harus diletakkan dalam tempat ketiga di bawah nilai kemanusiaan.

Namun, sesuai dengan sifat dasar bangsa Indonesia yang sangat menekankan kerukunan, maka nilai persatuan mempunyai tingkatan dan bobot nilainya, kiranya nilai persatuan mempunyai tingkatan dan bobot yang lebih tinggi dari nilai kerakyatan, karena nilai kerakyatan lebih merupakan sarana yang perlu untuk mencapai persatuan. Suatu hal yang diberikan penekanan adalah bahwa meskipun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai tingkatan dan bobot yang berbeda namun antara nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila saling dijiwai dan menjiwai.

Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila

Secara etimologis internalisasi dapat diartikan sebagai proses penghayatan, pendalaman, dan penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui pembinaan dan bimbingan.

Internalisasi bisa dilakukan melalui proses pembinaan dan bimbingan, maka peran pendidikan nilai sangat penting.

Pendidikan nilai merupakan proses bimbingan melalui suri teladan yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai kehidupan yang di dalamnya mencakup nilai-nilai agama, budaya, etika, dan estetika menuju pembentukan peserta didik yang memiliki kesadaran spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang utuh, berakhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara (Sumantri dalam Zakiah, 2014 : 10). Pendidikan nilai juga bisa diartikan sebagai bantuan kepada peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya. Pendidikan nilai tidak hanya merupakan program khusus yang dilaksanakan melalui sejumlah mata pelajaran, tetapi mencakup pula keseluruhan proses pendidikan.

Lickona (1992) menyatakan, bahwa pendidikan nilai akan menghasilkan karakter. Ada tiga komponen karakter yang baik, yakni pengetahuan tentang moral (*moral knowing*), perasaan tentang moral (*moral feeling*), dan perbuatan moral (*moral action*). Ketiga komponen tersebut menunjuk pada tahapan pemahaman sampai pelaksanaan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Ketiganya tidak serta merta terjadi pada diri seseorang, melainkan bersifat prosedural. Tahap pertama hanya mungkin terjadi setelah tercapai tahap kedua, dan tahap kedua hanya tercapai setelah tahapan pertama.

Kenyataannya ketiga tahapan tidak terjadi secara utuh, karena ada orang hanya sampai *moral knowing* dan berhenti sebatas

memahami. Di sisi lain orang lain sampai pada tahap *moral feeling* dan yang lain mengalami perkembangan dari *moral knowing* sampai *moral action*. *Moral knowing* adalah merupakan hal yang penting untuk diajarkan. *Moral knowing* terdiri dari enam hal, yaitu: 1). *Moral awareness* (kesadaran moral); 2). *Knowing moral values* (mengetahui nilai-nilai moral); 3). *Perspective taking*; 4). *Moral reasoning*; 5). *Decision making*; 6). *Self knowledge*.

Pendidikan nilai hanya sampai pada *moral knowing* tidak cukup, sebab sebatas pada tahu atau memahami tetapi belum mengamalkannya. Hal ini hanya akan menghasilkan orang-orang yang cerdas tetapi tidak bermoral. Maka amatlah penting pendidikan nilai untuk dilanjutkan sampai pada *moral feeling*. *Moral feeling* adalah aspek lain yang harus ditanamkan kepada peserta didik yang merupakan sumber energi dari diri manusia untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Ada enam hal yang merupakan unsur emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia yang bermoral, yaitu: *conscience* (nurani), *self esteem* (percaya diri), *empathy* (merasakan penderitaan orang lain), *love the good* (mencintai kebenaran), *self control* (mampu mengontrol diri), dan *humility* (kerendahan hati).

Langkah yang amat penting dalam pendidikan nilai adalah *moral action*. *Moral action* adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata. Tindakan moral merupakan hasil (*outcome*) dari dua komponen moral lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan

tersebut, maka harus dilihat dari tiga aspek lain, yaitu *competence* (kemampuan), *will* (keinginan), dan *habit* (kebiasaan).

Nilai secara etimologis berasal dari kata *Value* (Mustofa, 2003 : 15). Dalam kehidupan sehari-hari nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Kartini dan Giuno (2003 : 20) menyatakan bahwa nilai merupakan hal yang dianggap penting dan baik. Nilai merupakan konsep yang tercermin dari perilaku seseorang sehingga seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tergantung pada sistem nilai yang dipegangnya.

Linda dan Eyre (1997) menyatakan bahwa nilai adalah standar perbuatan dan sikap yang menentukan siapa kita, bagaimana kita hidup, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Tentu saja nilai-nilai yang baik yang bisa menjadikan orang hidup lebih baik, hidup lebih baik, dan memperlakukan orang lain secara lebih baik. Nilai tidak selalu sama bagi seluruh masyarakat manusia, karena dalam masyarakat sering terdapat kelompok yang berbeda-beda. Masing-masing kelompok memiliki sistem nilai yang berbeda-beda. Maka jika terjadi konflik metode dialog merupakan cara yang terbaik.

Hill (1991) berpendapat bahwa nilai sebagai acuan tingkah laku hidup manusia mempunyai tiga tahapan, yaitu : 1). *Values cognitive*, yaitu nilai-nilai pada tahapan dipikirkan atau *values cognitive*; 2). *Values affective*, yaitu nilai-nilai yang menjadi dorongan atau niat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu; 3). Tahap *values affective* meliputi *disposition* dan *commitments*; 3)

Values actions, yaitu tahap dimana nilai yang sudah men-
keyakinan dan menjadi niat yang kuat diwujudkan menjadi
tindakan nyata atau perbuatan konkret.

Hal yang berkaitan dengan pembinaan peserta didik,
tiga tahap, yaitu : (1). Tahap transformasi nilai. Tahap
merupakan tahap penyampaian informasi nilai-nilai kepada pes-
didik secara verbal; (2). Tahap transaksi nilai. Pada tahap
dilakukan komunikasi dua arah antara guru dengan peserta didik.
Tahap transinternalisasi nilai. Pada tahap ini merupakan taha-
yang paling tinggi, dimana guru dituntut melakukan komuni-
secara utuh sampai pada tataran penghayatan dan penjiwaan nilai.

Menurut Notonagoro (1974), bahwa realisasi nilai-
Pancasila, perlu secara berangsur-angsur diwujudkan mel-
pendidikan baik di keluarga, sekolah maupun dalam masyarakat
sehingga diperoleh hal-hal sebagai berikut: (1). Pengetahuan, ya-
sedapat mungkin lengkap yaitu meliputi pengetahuan bhu-
pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan filsafat tentang Pancasila.
ini sangat penting terutama bagi para calon pemimpin bangsa
calon ilmuwan. Dalam proses transformasi pengetahuan
diperlukan waktu yang cukup lama dan berkesinambungan
sehingga pengetahuan itu benar-benar dapat tertanam dalam seti-
individu. Tanpa pendidikan yang cukup maka dapat dipastikan
bahwa pemahaman tentang ideologi bangsa dan dasar filsafat nega-
hanya dalam tingkat-tingkat yang sangat pragmatis, dan hal ini
sangat berbahaya terhadap ketahanan ideologi generasi penerus
bangsa; (2). Kesadaran. Setelah seseorang mempunyai pengetahu-

ang Pancasila, maka seseorang harus mempunyai kesadaran
apa yang akan dilakukan. Kesadaran merupakan sikap selalu
mengetahui pertumbuhan keadaan yang ada dalam diri sendiri.
Kesadaran seseorang menjadi pijakan untuk melakukan introspeksi
kepada dirinya sendiri. Jika seseorang memiliki kesadaran yang
tinggi sebagai warga negara, maka akan muncul ketaatan terhadap
negara dan negaranya; (3). Ketaatan, yaitu selalu dalam keadaan
siap untuk memenuhi wajib lahir dan batin, lahir berasal dari luar
yaitu pemerintah, batin dari diri sendiri. Ketaatan merupakan
sikap yang ketiga dalam proses internalisasi nilai-nilai Pancasila.
Jika seseorang sudah memiliki pengetahuan tentang Pancasila
yang benar dan memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya
Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dalam
kehidupannya akan muncul ketaatan terhadap pengamalan nilai-nilai
Pancasila; (4). Kemampuan kehendak, yaitu keinginan mendasar
yang mendalam yang cukup kuat sebagai pendorong untuk
melakukan perbuatan. Jika seseorang sudah mempunyai kemampuan
kehendak yang kuat untuk melakukan perbuatan, berarti motivasi
dalam hatinya cukup bagus. Hal ini akan memudahkan pemahaman,
penghayatan dan penjiwaan nilai-nilai Pancasila yang akan
diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku; (5). Watak dan hati
nurani agar orang selalu mawas diri.

Hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh seseorang untuk
membentuk watak dan hati nurani agar seseorang mawas diri,
yaitu: (a). Dengan menilai diri sendiri apakah dirinya berbuat baik
atau tidak dalam melaksanakan Pancasila dan memberi sanksi batin

yang berwujud pujian atau celaan kepada diri sendiri, atau sebaliknya melakukan perbuatan membuat pedoman Pancasila berupa perintah, larangan, anjuran atau membiarkan untuk berbuat/ tidak berbuat yang ditaatinya sendiri juga. Apabila tidak mentaati maka akan memberi sanksi batin berupa celaan terhadap diri sendiri; Apabila telah melaksanakan maka akan diperoleh suatu kepuasan pribadi untuk mengamalkan Pancasila, yang selanjutnya akan merupakan suatu keyakinan tentang kebenaran; (c). Dengan demikian akan memiliki suatu ketahanan ideologi, sehingga dapat akan merupakan sumber kemampuan, untuk memelihara, mengembangkan, mengamalkan, mewariskan, merealisasikan Pancasila dalam segala aspek kehidupan; (d). Jika setiap orang Indonesia telah memiliki kondisi yang demikian keadaannya maka setiap orang Indonesia akan berkepribadian, berwatak dan berbudaya nurani Pancasila sehingga akan terjelmalah negara dan masyarakat Pancasila.

Agar realisasi itu menjadi perbuatan dalam bentuk tindakan yang tepat, maka harus dipikirkan dan dipelajari bentuk-bentuk pengamalan yang sesuai di berbagai bidang serta lingkungan. Pada dasarnya ada dua bentuk realisasinya yaitu bersifat statis dan dinamis yang bersifat dinamis. Statis dalam pengertian intinya, yaitu nilai yang abstrak umum universal karena sifatnya yang tetap tidak berubah. Bersifat dinamis dalam artian bahwa pengamalan harus senantiasa menyesuaikan dengan perubahan, pertumbuhan dan perbedaan, tanpa meninggalkan persatuan dan kesatuan nasional.

Pengamalan Pancasila

Pancasila tidak hanya harus dipahami, tetapi harus ada pengamalan lanjut sampai pada tataran internalisasi. Puncak internalisasi adalah tataran implememntasi pada tindakan nyata. Oleh karena itu pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi sesuatu hal penting dan menjadi keharusan. Di era industry 4.0 merupakan era yang maju, oleh karena itu sebagai bangsa yang besar bangsa Indonesia harus berpedoman dan berdasarkan pada Pancasila secara utuh.

Kebaharuan Moral Untuk Mengamalkan Pancasila

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia berpengaruh komekuensi setiap aspek penyelenggaraan negara dan sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang bersumber pada hakikat Pancasila adalah nilai-nilai abstrak umum universal, tetap dan tidak berubah. Nilai-nilai abstrak umum universal tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi norma-norma konkrit maupun norma-norma moral yang harus dilaksanakan dan mengamalkan oleh setiap warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, permasalahan pokok dalam pengamalan Pancasila adalah bagaimana wujud pengamalan itu, yaitu bagaimana nilai-nilai Pancasila yang umum universal tersebut dijabarkan dalam bentuk norma-norma yang jelas dalam kaitannya dengan tingkah laku setiap warga dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta kaitannya dengan segala aspek penyelenggaraan negara.

Selain itu dalam pengamalan Pancasila diperlukan juga kondisi yang dapat menunjang terlaksananya pengamalan

Pancasila tersebut, baik dalam kondisi yang berkaitan dengan setiap warga negara Indonesia dan wujud realisasi nilai-nilai Pancasila. Maka perlu disadari oleh setiap warga negara Indonesia bahwa dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara setiap warga negara memiliki sifat kodrat manusia bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Kesepakatan kita sebagai suatu kesepakatan yang luhur untuk mendirikan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila mengandung konsekuensi bahwa kita harus merealisasikan Pancasila itu dalam setiap penyelenggaraan negara dan setiap sikap tingkah laku kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan lain perkataan bagi bangsa Indonesia mengamalkan Pancasila adalah merupakan suatu keharusan.

Di samping itu dalam pengamalan Pancasila juga didasarkan pada dorongan lahir dan batin sebagai berikut: (a). Berdasarkan perjuangan kemerdekaan Indonesia dijiwai oleh hasrat sedalam-dalamnya untuk mendirikan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dengan perjuangan yang berdasarkan pada hak kemerdekaan maka harus diwujudkan kemerdekaan Indonesia; dan melanjutkan dalam suatu negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan ideologi Pancasila; (b). Pancasila adalah landasan berkeadilan dalam perjuangan melawan penjajah. Selain Pancasila merupakan asas kerokhaniaan negara Indonesia, baik dalam rangka tujuan-tujuan nasional maupun internasional; (c). Bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan negara Indonesia pada hakikatnya berdasarkan atas suatu hukum dasar negara yang mengandung

kepercayaan batinan dan cita-cita hukum. Hal ini berarti mewajibkan setiap penyelenggara negara, pemimpin pemerintah dan pemimpin masyarakat untuk memiliki semangat yang dinamis guna memelihara dan memperkerti kemanusiaan yang luhur untuk merealisasikan suasana yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang berintikan asas kerokhaniaan Pancasila; (d). Bagi setiap warga negara Indonesia seharusnya mendasarkan cipta, rasa, karsa dan karya atau nilai-nilai Pancasila.

Pada hakikatnya memiliki pengetahuan saja bagi setiap warga negara Indonesia belum cukup. Oleh karena itu yang paling penting bagi kita adalah mengetahui, kemudian meresapi, menghayati, dan akhirnya mengamalkan Pancasila dalam setiap penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Pengamalan Pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu pengamalan Pancasila secara subjektif yaitu realisasi pada setiap individu, dan pengamalan secara objektif yaitu realisasi dalam aspek kenegaraan dan hukum (Daroeso dan Suyahmo, 1989).

Pengamalan Pancasila Secara Subjektif

Pengamalan Pancasila secara subjektif adalah pelaksanaan oleh pribadi perseorangan, setiap warga negaranya, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia. Pengamalan Pancasila secara subjektif ini justru yang lebih penting karena realisasi yang subjektif merupakan persyaratan bagi pengamalan Pancasila yang objektif (Notonagoro, 1975). Dengan demikian pengamalan Pancasila yang subjektif ini sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan serta kesiapan individu untuk

merealisasikan Pancasila. Dalam pengertian ini pelaksanaan Pancasila yang subjektif yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan dimana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral. Sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakan Pancasila bukan hanya akan menimbulkan akibat hukum namun yang terlebih penting lagi akan menimbulkan akibat moral. Dalam pengertian inilah maka fenomena konkret yang ada pada seseorang yang berkaitan dengan sikap dan tingkah laku seseorang dalam realisasi Pancasila secara subjektif disebut moral Pancasila. Moral Pancasila atau Pengamalan Pancasila bersifat subjektif ini lebih berkaitan dengan kondisi objektif, yaitu berkaitan dengan norma-norma moral.

Dalam pengamalan Pancasila yang bersifat subjektif, bilamana nilai-nilai Pancasila telah dipahami, diresapi dan dihayati oleh seseorang maka seseorang itu telah memiliki moral pandangan hidup. Bilamana hal ini berlangsung secara terus-menerus sehingga nilai Pancasila telah melekat dalam hati sanubari bangsa Indonesia maka kondisi yang demikian disebut dengan kepribadian Pancasila. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia telah memiliki suatu ciri khas sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Bilamana pengertian ini diterapkan pada bangsa Indonesia sebagai kelompok manusia Indonesia, pengertian kepribadian Indonesia dapat dikembalikan kepada hakikat manusia. Telah diketahui bahwa segala sesuatu itu memiliki tiga macam hakikat yaitu: (1). Hakikat abstrak, yaitu terdiri dari unsur-unsur yang bersama-sama menjadikan halnya itu ada, dan menyebabkan sesuatu yang

menjadi berbeda bangsa jenis lain. Misalnya jenis manusia, tumbuhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu hakikat abstrak bersifat abstrak, umum universal; (2). Hakikat pribadi, yaitu memiliki ciri-ciri yang khusus, yang tetap melekat pada sesuatu sehingga membedakan sesuatu itu dengan yang lainnya. Bagi bangsa Indonesia hakikat pribadi inilah yang disebut kepribadian, dan hakikat pribadi ini merupakan penjelmaan dari hakikat abstrak; (3). Hakikat konkret, adalah hakikat segala sesuatu dalam kenyataan, dan hakikat ini merupakan penjelmaan dari hakikat abstrak dan hakikat konkret.

Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia, pengertian kepribadian Indonesia ini memiliki tingkatan yaitu: (a). Kepribadian kemanusiaan berupa sifat-sifat hakikat kemanusiaan 'monopluralis', jadi sifat kemanusiaan yang abstrak umum universal. Dalam pengertian ini disebut dengan kepribadian kemanusiaan karena mencakup jenis manusia, dan memiliki sifat-sifat kemanusiaan; (b). Kepribadian Pancasila yang mengandung sifat-sifat kemanusiaan yang telah terwujud dalam sifat-sifat khas kepribadian Indonesia, yakni kepribadian Pancasila dan ditambah dengan sifat-sifat yang tetap melekat pada bangsa Indonesia, sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain; (c). Kepribadian kemanusiaan Indonesia dalam realisasi konkretnya, setiap orang, suku bangsa, memiliki sifat-sifat tidak tetap, dinamis tergantung pada situasi, situasi dan kondisinya. Dalam pengertian yang ketiga ini bangsa Indonesia realisasi konkret sehingga bersifat tidak tetap (Notonagoro, 1991).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pengamalan subjektif dari Pancasila, meliputi pelaksanaan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dalam pelaksanaan konkretnya tercermin dalam tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari

3. Pengamalan Pancasila Secara Objektif

Pengamalan Pancasila secara objektif, adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dan sebagainya bentuk bidang kenegaraan dan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Hal itu antara lain dirinci sebagai berikut : (a). Tafsir Undang-Undang Dasar 1945 harus dilihat dari sudut dasar filsafat negara Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinie IV; (b). Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 dalam Undang-undang harus mengikat dasar-dasar pokok pikiran yang tercantum dalam dasar filsafat negara Indonesia; (c). Tanpa mengurangi sifat-sifat Undang-Undang yang tidak dapat di ganggu gugat, interpretasi pelaksanaannya harus mengingat unsur-unsur yang terkandung dalam filsafat negara; (d). Interpretasi pelaksanaan Undang-Undang harus lengkap dan menyeluruh, meliputi seluruh perundang-undangan di bawah Undang-Undang dan keputusan-keputusan administrasi pemerintahan sampai dengan alat-alat perlengkapan negara di daerah, keputusan keputusan pengadilan serta alat perlengkapannya begitu juga meliputi usaha kenegaraan dan rakyat; (e). Dengan demikian seluruh hidup kenegaraan dan tertib hukum Indonesia didasarkan atas

yang diarahkan oleh asas politik dan tujuan negara yang berdasarkan atas asas kerokhaniaan Pancasila.

Hal ini termasuk pokok kaidah negara serta pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1959 juga didasarkan atas asas kerokhaniaan Pancasila. Bahkan yang lebih penting lagi adalah dalam realisasi pelaksanaan konkretnya itu dalam setiap penentuan kebijaksanaan di bidang kenegaraan, antara lain : (1). Hukum dan perundang-undangan serta peradilan; (2). Pemerintahan; (3). Politik dalam dan luar negeri; (4). Ketertahanan, keamanan dan pertahanan; (5). Kesejahteraan; (6). Kebudayaan; (7). Pendidikan; (8). Reformasi dan segala pelaksanaannya (Kaelan, 1993).

Penutup

Saat sekarang kita memasuki era Industri 4.0 mau tidak mau, kita tidak suka sebagai bangsa Indonesia harus siap. Kesiapan itu harus ditunjukkan dengan berbagai tindakan nyata. Jika tidak, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang tertinggal dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia memiliki pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Disadari atau tidak Pancasila mampu mempererat dan mempersatukan bangsa ini.

Sebagai penyeimbang dan penyelaras kemajuan era industry 4.0 maka pendidikan nilai Pancasila sebagai salah satu kuncinya. Oleh karena itu Pancasila harus dipahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui kesadaran yang utuh terhadap Pancasila, melalui penjiwaan secara

mendalam dalam setiap sanubari, dan melalui pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari kita yakini dapat digunakan sebagai modal dalam mengemabngkan bangsa ini menjadi bangsa yang mempunyai jati diri, maju dan bermartabat yang tidak akan lag dengan terjangan era apapun. Hal ini disebabkan Pancasila mempunyai nilai dasar yang permanen dan kuat serta nilai instrum yang akan mampu mengikuti perkembangan zaman.

Referensi

- Budiyono, K. (2009). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Bandung : Alfabeta.
- Darmodihardjo, D. (1988). *Pancasila suatu Orientasi Sing*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Daroeso, B. & Suyahmo. (1989). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta : Liberty.
- Hill, B.V. (1991). *Value Education in Australian Schools*. Melbourne : Radford House.
- Kaelan, M.S. (1993). *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta : Paradigma.
- _____ (2002). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta : Paradigma.
- Kartini, K & Guno. (2003). *Kamus Psikologi*. Bandung : Pioner
- Lickona, Th. (1992). *Educating for Character, How our schools can teach respect and responsibility*. New York : Holt, Rinehart and Wiston.
- Linda, R. & Eyre, R. (1997). *Mengajarkan Nilai-Nilai kepada Anak* (Terjemahan Alex Tri Kartono Widodo). Jakarta : Gramedia Pustaka.

- _____ (2009). *Evaluasi Pendidikan Nilai, Perkembangan Moral Keagamaan Mahasiswa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- _____ (2002). *Paradigma Pendidikan Islam : Upaya mengefektifkan pendidikan agama islam di sekolah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- _____ (2011). *Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- _____ (2011). *Konstruksi Filsafat Nilai : Antara normativitas dan realitas*. Makasar : Alaudin Pers.
- _____ (1971). *Pengertian Dasar bagi Implementasi Pancasila untuk ABRI*. Jakarta : Departemen Pertahanan dan Keamanan.
- _____ (1974). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta : Pantjuran Tudjuh.
- _____ (1975). *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta : Pantjuran Tudjuh,
- _____ (2012). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- _____ (2002). *Interaksi dan Motivasi Belajar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- _____ (2001). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Yayasan pembinaan Fakultas Filsafat UGM.
- _____ (1998). *Isu dan Agenda pendidikan tinggi di Indonesia*. Jakarta : PT. Rosda Jaya Putra.
- _____ (2003). *Menuju Masyarakat Tertib Damai Salan Bahagia sebagai Karakter Bangsa Masa Depan*. Yogyakarta : Makalah. 19-20 Mei 2003.